



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – By-Pass Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1719/DJU.1/PW1.4/XI/2025

Jakarta, 06 November 2025

Sifat : Terbatas

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Perintah

Yth.

1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait
2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15617/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 Hal: Perintah, serta dalam rangka Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan, dengan ini menginstruksikan kepada:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen untuk:
 - 1) Memedomani ketentuan pelaksanaan anggaran dan lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Menarik kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang tahun dan menyetorkannya ke Kas Negara dengan akun penyetoran 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu), serta menyampaikan bukti setor berupa Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Aplikasi SIMARI dan SIMPONI
 - c. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar lebih cermat dalam menguji Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukungnya; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam melakukan pengujian bukti tagihan belanja.
- Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Kurnia Arry Soelaksono

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15617/SEK/PW1.4/X/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 16 Oktober 2025

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
(Daftar Nama Satuan Kerja Terlampir)

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan, dengan ini memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja terkait untuk:

- a. Memedomani ketentuan pelaksanaan anggaran dan lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja terkait untuk:
 - 1) Memedomani ketentuan pelaksanaan anggaran dan lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp89.738.285,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara dengan akun penyetoran 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu), serta menyampaikan bukti setor berupa Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Aplikasi SIMARI dan SIMPONI.
- c. Menginstruksikan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja terkait lebih cermat dalam menguji Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukungnya; dan
- d. Menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja terkait lebih cermat dalam melakukan pengujian bukti tagihan belanja.

Adapun tindak lanjut dikirimkan melalui surat elektronik ke informasi.bawas@mahkamahagung.go.id dan tgrbirkeu@gmail.com sebelum tanggal 14 November 2025.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
8. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
9. Yth. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung;
10. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait; dan
11. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait.

B.7.a-d



LAMPIRAN

Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia

Nomor : 15617/SEK/PW1.4/X/2025

Tanggal : 16 Oktober 2025

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA

No.	Nama Satuan Kerja
1.	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
2.	Pengadilan Tinggi Bandung
3.	Pengadilan Tinggi Kendari
4.	Pengadilan Tinggi Agama Bandung
5.	Pengadilan Negeri Bandung
6.	Pengadilan Negeri Banjar
7.	Pengadilan Negeri Gorontalo
8.	Pengadilan Agama Ngamprah
9.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
10.	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

BELANJA BBM TIDAK SESUAI KONDISI SENYATANYA TAHUN 2024

No.	Nama Satuan Kerja	Nilai yang harus di Setor (Rp)	Akun Penyetoran
1	Pengadilan Tinggi Bandung	1.100.000,00	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
2	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	2.350.000,00	
3	Pengadilan Negeri Bandung	300.000,00	
4	Pengadilan Negeri Banjar	19.121.900,00	
5	Pengadilan Agama Ngamprah	14.770.000,00	
Jumlah		37.641.900,00	

BELANJA SEWA BERUPA BANTUAN SEWA RUMAH DINAS TIDAK VALID

No.	Nama Satuan Kerja	Nilai yang harus di Setor (Rp)	Akun Penyetoran
1	Pengadilan Tinggi Kendari	4.825.945,00	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah		4.825.945,00	

BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN BERUPA PENGADAAN PAKAIAN DINAS TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI YANG VALID

No.	Nama Satuan Kerja	Nilai yang harus di Setor (Rp)	Akun Penyetoran
1	Pengadilan Negeri Gorontalo	2.260.000,00	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah		2.260.000,00	

REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2024 ATAS PEMBAYARAN BELANJA SEBELUM TAHUN 2024

No.	Nama Satuan Kerja	Nilai yang harus di Setor (Rp)	Akun Penyetoran
1	Pengadilan Negeri Banjar	35.000.000,00	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	10.010.440,00	
Jumlah		45.010.440,00	

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

B.7.a-d

